# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI

## **Kajian Penelitian Terdahulu**

 Kajian penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru bagi peneliti berikutnya. Selain itu kajian penelitian terdahulu membantu peneliti dalam memposisiskan penelitian dan menunjukan originalitas dari peneliti. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa hasil penelitian terdahulu yang diizinkan untuk dipublikasikan. Hasil penelitian tersebut berhubungan dengan Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan dengan analisis perencanaan pembangunan di Kabupaten Subang. Untuk memudahkan dalam pemahaman mengenai kajian penelitian terdahulu di sajikan menggunakan tabel sebagai berikut:

1. Penelitian Terdahulu (Literature Riview) 1

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Judul Penelitian** | Analisis Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir |
| **Nama Peneliti** | Safriyadi dari Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru |
| **Latar Belakang Historis *(Historical background)*** | Penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana penerapan SIPD di Kabupaten Indragiri Hilir dan menemukan Permasalahan dalam keterisian data sistem informasi daerah yang belum lengkap, sehingga kabupaten Indragiri hilir menempati peringkat 11 dari 12 kabupaten/kota di provinsi Riau dalam hal keterisian data pada SIPD. |
| **Konteks Kekinian Terkait Dengan Topik (Current Context)** | Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) akan membantu Kepala Daerah/Kepala Lembaga/Kepala Badan/Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja masing-masing dalam memperoleh informasi dan data yang akurat. Dan pengapliaksi Sistem Informasi Pembangunan Daerah juga merupakan suatu percepatan pelaksaan Inpres Nomor : 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Elektronik Governmant |
| **Teori – Teori yang dipergunakan Oleh penelitian lain (Theories Underpinning)** | Teori pengembangan elektronik government Richardus Eko Indrajit memiliki indikator yang terdiri dari Support, Capacity, dan Value. |
| **Mendudukan Terminologi yang relevan pada Berbagai penelitian *(Terminology)* atau metode penelitian**  | Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan dengan metode deskriptif |
| **Bukti pentingnya topic riset**  | Jika dimaksimalkan, SIPD akan memberikan manfaat yang akan dirasakan jika data tersebut tersedia, seperti peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan pemantauan perkembangan daerah, serta kemudahan pendataan sehingga tidak memerlukan proses yang lama |
| **Keunggulan penelitian yang kita lakukan** | Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini akan berfokus pada perencanaan pembangunan daerahnya, sehingga penelitian akan lebih mengerucut. Pada dasarnya SIPD yang awal masih berada di tahap E – Database, dimana data – data pembangunan harus terisi. Sedangkan pada SIPD yang terbaru yang diperbaharui pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD sudah memiliki beberapa konteks yakni; E – Budgeting, E – Planning, e - Database dan sedang pengembangan untuk E – Monev dan E – Reporting. |

1. Penelitian Terdahulu *(Literature Riview)* 2

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Judul Penelitian** | Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di B|adan Perencanaaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang |
| **Nama Peneliti** | Nur Amanah dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |
| **Latar Belakang Historis *(Historical background)*** | Permasalahan dalam keterlambatan pengumpulan data, lemahnya Koordinasi Antara Bappeda dengan OPD yang terkait dan kurangnya budaya Information Share pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Serang. |
| **Konteks Kekinian Terkait Dengan Topik (Current Context)** | Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah sistem untuk mendokumentasikan, mengelola, dan mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada publik dan mendokumentasikan pengambilan keputusan dalam rangka pembangunan daerah  |
| **Teori – Teori yang dipergunakan Oleh penelitian lain (Theories Underpinning)** | Penelitian tersebut menggunakan Teori Model Implementasi Kebijakan Publik dari George C. Edward III memiliki indikator yang terdiri dari Komunikasi, Sumber daya, disposisi atau sikap, dan Struktur Organisasi. |
| **Mendudukan Terminologi yang relevan pada Berbagai penelitian *(Terminology)* atau metode penelitian** | Penelitian tersebut menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan metode deskriptif |
| **Bukti pentingnya topic riset**  | SIPD bertujuan untuk mendorong terciptanya sistem data dan informasi untuk pengambilan keputusan dan perencanaan pengembangan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah terhadap kolaborasi berbasis data dan informasi. |
| **Keunggulan penelitian yang kita lakukan** | Penelitian milik peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang akan lebih *up to date* mengenai SIPD. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Amanah berfokus pada kebijakan permendagri nomor 8 tahun 2014 dimana yang kini telah di perbaharui pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Penelitian peneliti akan menggunakan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 sebagai dasar pada penelitian in. |

1. Penelitian Terdahulu *(Literature Riview)* 3

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Judul Penelitian** | IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MANADO (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado) |
| **Nama Peneliti** | Nadya Celine Wurara, Alfon Kimbal, Dan Neni Kumayas Universitas Sam Ratulangi |
| **Latar Belakang Historis *(Historical background)*** | Penelitian tersebut menemukan permasalahan pada keterlambatan penginputan dari setiap instansi yang wajib menginput data perencanaannya dan masih ada operator yang masih belum dapat mengerti menggunakan aplikasi berbentuk web ini, aplikasi berbentuk web ini sementara di gunakan di setiap instansi yang ada di kota Manado dalam membuat laporan perencanaan pembangunan daerah dan Melihat terobosan baru yang digunakan pemerintah Kota Manado. |
| **Konteks Kekinian Terkait Dengan Topik (Current Context)** | Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau disingkat SIPD adalah sistem informasi yang memuat seluruh sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah lainnya, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. |
| **Teori – Teori yang dipergunakan Oleh penelitian lain (Theories Underpinning)** | Penelitian tersebut menggunakan Teori Model Implementasi Kebijakan Publik dari George C. Edward III yang indikatornya terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur organisasi, |
| **Mendudukan Terminologi yang relevan pada Berbagai penelitian *(Terminology)***  | Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif |
| **Bukti pentingnya topic riset**  | SIPD dapat meningkatkan dan mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan publik. |
| **Keunggulan penelitian yang kita lakukan** | Penelitian ini sudah menggunakan SIPD yang baru seperti penelitian yang dilakukan oleh peneliti, akan tetapi penelitian milik peneliti akan lebih rinci membahas SIPD dan implementasi serta keunggulan dan kelemahan dalam penerapan SIPD saat ini. |

## **Landasan Teori**

### Administrasi

 administrasi adalah suatu usaha atau kegiatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan. Dalam arti sempit, administrasi mengacu pada catatan, surat, pembukuan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan administrasi. Secara garis besar Administrasi adalah suatu proses kegiatan kolaboratif antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu.

 Administrasi menurut **John M. Pliffner** dalam (Sahya Anggara, 2012) menyatakan bahwa “administrasi dapat dirumuskan sebagai pengorganisasian dan penjurusan sumber – sumber dan bahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan”. Pada penjelasan Pliffner, beliau mengartikan bahwa administrasi sebagai kerjasama suatu organisasi dengan memanfaatkan sumber serta bahan untuk mencapai tujuannya. Sedangkan menurut **Sondang P. Siagian** dalam (Sahya Anggara, 2012) menyatakan bahwa “Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalisme tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Sondang P. Siagian, beliau mengartikan administrasi adalah usaha bersama dari banyak individu yang bekerja untuk suatu tujuan tertentu.

Faktor - faktor terjadinya administrasi ialah:

1. Kelompok orang: beberapa orang yang tujuan utamanya bekerja sama dalam usaha mencapai tujuan bersama;
2. Kerjasama: kegiatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur, oleh dua orang atau lebih;
3. Tujuan: nilai kehidupan manusia, baik yang berupa materi fisik maupun yang berupa mental dan spiritual. (Sahya Anggara, 2012)

 Berdasarkan penjelasan di atas, manajemen dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi yang terdiri dari beberapa orang yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

### Administrasi Publik

 Secara umum, administrasi publik dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan kolaboratif yang dilakukan oleh perangkat negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tiga aspek lembaga pemerintah yaitu, lembaga administrasi, legislatif, dan yudikatif, serta yang terkait dengan publik, seperti administrasi publik, seperti kebijakan publik, manajemen publik, dan sebagainya.

Menurut **Chandler dan Plano (1988:29)** dalam (Meutia, 2017) menyatakan bahwa “Administrasi adalah proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan personel untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola kebijakan publik”. Keduanya juga menjelaskan bahwa administrasi publik adalah seni dan ilmu yang dirancang untuk mengelola urusan publik dan melakukan berbagai tugas yang diberikan. Menurut **George J. Gordon** dalam (Meutia, 2017), “Administrasi Publik dapat didefinisikan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan suatu organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan aturan yang dikeluarkan oleh badan eksekutif, badan legislatif, serta pengadilan”. Sedangkan Menurut **Kasim** dalam (Hendri, 2019) menyatakan bahwa:

 “administrasi publik sangat berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik".

 Ilmu Administrasi Publik dalam hal ini mengalami beberapa kali pergeseran pada beberapa paradigma yang berawal dari paradigma Old Public Administration (OPA) sekitar tahun 1885/1887 sampai 1980an akhir, New Public Management (NPM) yang berkembang pada akhir 1980an sampai pertengahan 1990an dan juga New Public Service (NPS) yang berkembang sejak pertengahan tahun 1990an hingga sekarang. Hingga saat ini ilmu administrasi Publik atau dikenal dengan Administrasi negara di Indonesia telah berada pada paradigm New Public Service (NPS). Dalam hal ini,

 Dalam skenario ini, tugas administrator publik adalah membiarkan publik terlibat dalam pemerintahan dan melayani masyarakat. Administrator publik memungkinkan publik untuk terlibat dalam kegiatan pemerintah dan membantu masyarakat dengan melakukan fungsi-fungsi ini. Dalam melaksanakan tugas ini, Administrator menyadari bahwa terdapat sistem akuntabilitas, etika, dan akuntabilitas yang kompleks dalam sistem demokrasi. Administrator tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana untuk mencapai tujuan.

**Nikolas Henry** dalam (Meutia, 2017) menguraikan ruang lingkup administrasi publik, sebagai berikut:

1. Organisasi publik terutama untuk model organisasi dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen publik sistem manajemen dan evaluasi program ilmiah dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia.
3. Pendekatan dan praktik kebijakan publik terkait privatisasi, administrasi antar pemerintah, dan etika birokrasi.

### Manajemen Publik

 Manajemen publik merupakan fondasi bagi setiap organisasi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Manajemen publik menurut **Stoner (1982:4)** dalam (Satibi, 2012) yang menjelaskan bahwa manajemen sebagai “proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

 Dalam hal ini pemimpin organisasi memegang peranan yang vital dalam pelaksanaan manajemen publik, karena pemimpin harus memiliki gambaran tentang proses operasi manajemen publik di organisasi yang dipimpinnya. Selain itu, sumber daya organisasi sangat penting, diera 4.0 ini, organisasi publik harus mempertimbangkan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mencapai tujuannya secara efektif. Adapun karakteristik konsep manajemen dalam (Satibi, 2012) yakni:

1. Adanya proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang pimpinan,
2. Berhubungan dengan pencapaian tujuan,
3. Dilakukan secara sadar dan terus – menerus.

### Kebijakan Publik

 Kebijakan publik dapat dikatakan sebagai produk yang dihasilkan oleh pemerintah, yang berisi pengambilan keputusan atas masalah-masalah yang terjadi dan memiliki hubungan dengan masyarakat. **Peters** dalam (Muksin, 2019) mendefinisikan “kebijakan publik sebagai keseluruhan kegiatan pemerintah, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui pihak lain, yang mempengaruhi kehidupan penduduk di negara tersebut”. **Ealau dan Prewit** dalam (Nasir, 2019) menyatakan bahwa “kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang kosisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya”. Sedangkan Menurut **Islamy (1997: 20)** dalam (Anggara, 2012) mengemukakan bahwa “kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat”. Dalam pengertian terdapat empat pengertian tentang kebijakan publik, yaitu:

1. kebijakan publik berupa penetapan pemerintah;
2. kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
3. kebijakan publik yang baik untuk melakukan sesuatu dan didasarkan pada maksud dan tujuan tertentu;
4. Kebijakan publik harus selalu ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat.

### Implementasi

 Secara umum, implementasi adalah proses memastikan bahwa suatu kebijakan atau rencana diimplementasikan. Dalam KBBI implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan. Implementasi menurut B. R. Ripley dan G. A. Franklin dalam (Hikmah, 2020) “Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan *(benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata.”

 Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa Implementasi adalah rencana atau program atau kebijakan yang telah dan sedang dilaksanakan. Pengimplementasian kebijakan selalu ada pertimbangan dari instansi terkait, baik pengimplementasian system yang akan di gunakan dan sebagainya.

 Van Meter dan van Horn dalam (Akib, 2010) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.”

 Implementasi kebijakan menghubungkan tujuan kebijakan dan implementasinya dengan kinerja pemerintah. pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn dalam (Akib, 2010) bahwa “tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.”

### Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sistem informasi yang mendukung penyediaan informasi dan data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan secara elektronik, pemantauan dan evaluasi daerah yang digunakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 274 bahwa Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah (SIPD). Sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 ini mengubah istilah SIPD yang pada awalnya Sistem Informasi Pembangunan Daerah menjadi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut bertujuan untuk memberikan fungsi yang maksimal pada SIPD nantinya.

 Tata cara pengumpulan data dalam konsep SIPD sebelumnya tidak terfokus pada data perencanaan pembangunan daerah, dan SIPD terutama berfungsi sebagai bank data pembangunan. Di sisi lain, gagasan SIPD terus mengutamakan konten data daripada penggunaan data, yang berdampak negatif pada kemauan pemerintah daerah untuk mengelola SIPD. Selanjutnya, kelompok data, tipe data, dan elemen data SIPD lama masih tercampur antara data dan informasi. Berdasarkan permasalahan dan tantangan perubahan SIPD, kini telah terjadi perubahan SIPD, yaitu (1) SIPD saat ini fokus untuk perencanaan pembangunan daerah, (2) Data dalam SIPD saat ini dikelompokan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; (3) SIPD menjadi persyaratan dalam pengajuan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan (4) pengembangan SIPD menjadi 4 bagian yaitu e–database, e-planning, e-reporting, dan e-monev

*Blue Print* SIPD

 Gambar 2.2.7 Blue Print SIPD 1



Sumber: Dirjen Bangda Kemendagri 2018 dalam (Kabupaten Subang, 2019)

Adapun Tujuan SIPD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi daerah dengan menyediakan data pembangunan dan informasi pembangunan daerah yang akurat, terkini dan terakselerasi;
2. Mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, evaluasi, dan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah;
3. Menetapkan basis data hukum pembangunan rumah di berbagai daerah sebagai bahan masukan dasar perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah; (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang, 2019)

### Perencanaan Pembangunan

 Secara umum perencanaan adalah kegiatan yang merumuskan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan. Perencanaan dilakukan untuk memilih tujuan dan mencari cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut George R. Terry:

 “Planning is the selection and relating of facts and making and using of assumption regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired result.” Artinya, perencanaan adalah “suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang.” (Ayu Natalia Hutapea, 2015)

 Pembangunan pada pada dasarnya adalah perubahan atau peningkatan kapasitas fisik dan non fisik Secara fisik, pembangunan dapat dilihat dengan kasat mata dan dapat dirasakan langsung, prosesnya pun tidak terlalu lama, misalnya pembangunan infrastruktur. Sedangkan pembangunan non fisik tidak dapat dirasakan secara langsung, namun pembangunan non fisik ini memberikan dampak yang sangat besar, misalnya pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM sangat baik untuk prospek masa depan suatu daerah, Semakin baik tingkat Sumber daya manusianya semakin baik pula prospek masa depan daerah tersebut. Menurut Sondang P. Siagian pembangunan adalah “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa (*nation building*)”. (Ayu Natalia Hutapea, 2015)

 Perencanaan pembangunan secara umum merupakan penyusunan kagiatan atau program untuk membangun atau mengembangkan suatu daerah. Perencanaan pembangunan ini memiliki tujuan untuk memberikan rel dalam pembangunan agar kegiatan pembangunan memiliki tahapan – tahapan yang jelas. Menurut Arthur W.Lewis (1965) dalam (Zulkarnain Tompo, 2015) “perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia lebih produktif”.

 Perencanaan pembangunan daerah juga menggambarkan upaya sistematis pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan arah kebijakan, strategi, dan prioritas program selama periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan. Dadang solihin dalam (Andryan Dapakuri, 2020) yaitu:

1. Mengurangi disparitas atau pembangunan antar wilayah dan antar sub wilayah antar masyarakat (persamaan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja.
4. peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
5. memelihara dan melestarikan lingkungan dan sumber daya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

### Kajian Operasional Teori

 Penelitian ini menggunakan indikator dari teori model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, diantaranya adalah faktor 1). Komunikasi 2). Sumberdaya 3). Disposisi 4). Struktur Birokrasi. Peneliti teoritis ini karena mudah dijangkau dan ditentukan serta cocok untuk mengukur implementasi suatu kebijakan. Ada empat variabel dalam teori ini, yaitu sebagai berikut::

1. Komunikasi ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dijalankan dengan baik jika ada kesesuaian yang tepat antara pelaksana program dan pencapaian target. Menurut Edward III (1980), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency).(Tuti, 2020)
2. Sumber daya, bahwa setiap pendekatan harus dijunjung dengan sumber daya yang memadai, baik SDM maupun aset moneter. Seluruh SDM merupakan kualitas dan jumlah pelaksana yang dapat sampai pada tujuan yang diharapkan. Aset moneter adalah modal spekulasi untuk suatu program/strategi..
3. Disposisi atau sikap, yang menunjukkan ciri atau sikap yang melekat erat pada pelaksana kebijakan/program. Karakter penting yang dimiliki oleh para pelaksana adalah kejujuran, komitmen dan demokratisasi. Ada tiga sikap/tanggapan terhadap pelaksana kebijakan, yaitu pelaksana, petunjuk/petunjuk yang diterima atau ditolak oleh pelaksana dalam menanggapi program, dan tanggapan terhadap bentuk kebijakan.
4. Struktur birokrasi, yang menunjukkan bahwa pegawai penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini mencakup dua hal penting, yaitu struktur organisasi itu sendiri.

## **Kerangka Berpikir**

 Menurut Notoatmodjo (2010) “kerangka merupakan formulasi atau simplikasi dari kerangka teori atau teori-teori yang mendukung penelitian tersebut”. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi SIPD di BP4D Kabupaten Subang. Selain itu kesiapan Sumber Daya Manusia Aparatur di Kabupaten Subang masih belum maksimal untuk mengoperasikan SIPD. Oleh karena itu peneliti memantapkan diri untuk melakukan penelitian mengenai SIPD, khususnya di BP4D Kabupaten Subang. Dalam hal ini identifikasi permaalahan – permasalahan dan teori – teori yang yang berkaitan dengan Implementasi Sistem Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan DI Kabupaten Subang, maka peneliti membuat Kerangka Konsep sebagai berikut:

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir 1

## **Proposisi Penelitian**

 Proposisi adalah asumsi sementara dari studi tentang fenomena yang terjadi. Berdasarkan konsep ini, maka proposisi penelitian adalah, sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di BP4D Kabupaten Subang diteliti menggunakan indikator dari teori model implementasi kebijakan public yang dikemukakan oleh **George C. Edward III** (1980) yang terdiri dari Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau Sikap, dan Struktur birokrasi
2. Implementasi SIPD yang maksimal dapat menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang baik, efektif, dan efisien,
3. Hambatan dalam pengimplementasian SIPD dapat teridentifikasi.